

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR
ANTARA PEMBELI DENGAN PT. FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE (FIF) CABANG KOTA SURAKARTA**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Disusun Oleh:

DENY TATAK SETIAJI
C 100040099

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktek kehidupan sehari-hari lembaga keuangan yang sudah tidak asing dikenal oleh masyarakat adalah bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.¹

Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut bank ini tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank. Hal ini semakin nyata terlihat dari banyaknya bank-bank yang di likuidasi. Kondisi demikian ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan dana segar yang sangat dominan dan dibutuhkan oleh dunia perekonomian.

Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga

¹ Munir Fuady, 2002, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 45

penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat daripada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkannya seperti, *leasing*² (sewa guna usaha), *factoring*³ (anjak piutang), modal ventura, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.⁴

Kegiatan pembiayaan mulai diperkenalkan dalam usaha perusahaan pembiayaan dimulai pada waktu dikeluarkannya keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251 / KMK. 013 / 1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, diubah, dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 448 / KMK. 017 / 2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan, dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

² Leasing atau sewa-guna-usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama

³ Menurut Kasmir dalam "Bank dan Lembaga Keuangan lainnya" (2002) menjelaskan bahwa anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan factoring adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien).

⁴ Budi Rachmat, 2002, *Multi Finance Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri. Hal. 34

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai lawan produsen.

Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per-konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil dan sebagainya. Karena itu, risiko dari pembiayaan ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya.

Pengertian lembaga pembiayaan keuangan bukan bank dapat dilihat definisi pembiayaan konsumen (*consumer finance*) berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menjelaskan bahwa “*lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal*”.

Pembiayaan merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai lawan produsen.

Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil dan sebagainya. Karena itu, risiko dari pembiayaan ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan (*leasing*) atau dikenal dengan istilah *consumer service*.

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu digaris-bawahi dan merupakan dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu;

- a) Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternative pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b) Obyek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain sebagainya.
- c) Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.
- d) Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel tidak terikat dengan ketentuan seperti *financial lease*.

Dewasa ini, jenis lembaga pembiayaan (*leasing*), meskipun masih terbilang muda usianya tetapi sudah cukup populer dalam dunia bisnis di

Indonesia, mengingat sifat dari transaksi lembaga pembiayaan tersebut mampu menampung masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan jenis pembiayaan yang biasa di bank-bank. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya.

Pembiayaan timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu perusahaan pembiayaan dan konsumen. Dalam perjanjian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak.⁵ Perjanjian pembiayaan tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah, suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam Buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata

⁵ ----- 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

maupun KUHD, dengan demikian oleh undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.⁶

Kegiatan pembiayaan konsumen hampir sama dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), namun ada beberapa hal yang membedakan keduanya yaitu:

- a) Kepemilikan barang atau objek pembiayaan yang dilakukan berbeda, dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*) berada pada *lessor* sedangkan pada pembiayaan konsumen berada pada konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan.
- b) Tidak ada batasan jangka waktu pembiayaan, seperti dalam *financial lease* jangka waktu pembiayaan diatur sesuai dengan obyek barang modal yang dibiayai oleh *lessor*.
- c) Pembiayaan konsumen tidak membatasi pembiayaan kepada calon konsumen yang telah mempunyai NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas, seperti ketentuan sewa guna usaha (*leasing*).

⁶ Patrick Purwahit, 1986, *Asas Itikat Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang: Balai Penerbit UNDIP. Hal. 23

- d) Perlakuan perpajakan antara transaksi sewa guna usaha (*leasing*) dan transaksi pembiayaan konsumen, berbeda baik dari sisi perusahaan pembiayaan maupun dari sisi konsumen.
- e) Kegiatan *sales* anda *lease back* dimungkinkan dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*), sedangkan dalam transaksi pembiayaan konsumen ketentuan ini belum diatur.

Pelaksanaan kegiatan pembiayaan konsumen sehari-hari, sama dengan kegiatan pembiayaan sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi untuk perorangan, sehingga dalam prakteknya produk pembiayaan konsumen dijadikan pengganti sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi. transaksi pembiayaan konsumen yang biasa dilakukan oleh perusahaan pembiayaan adalah seperti *direct finance lease*, dimana dalam transaksi ini debitur belum pernah memiliki barang kebutuhan konsumen yang akan menjadi objek pembiayaan konsumen.. Dengan demikian kreditur atas nama debitur akan membeli barang kebutuhan konsumen tersebut secara langsung kepada *supplier/dealer/developer* dengan menggunakan nama debitur sebagai pemilik.

Dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah yang timbul.

Salah satu bentuk permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua antara konsumen dngan

PT FIF Cabang Kota Surakarta adalah kelambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen atau *costumer*.⁷ Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh PT FIF Cabang Kota Surakarta selaku perusahaan yang memberikan kredit kepada konsumen.

Faktor penyebab keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (cicilan) atau *customer* dalam perjanjian pembiayaan kendaraan roda dua dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:⁸

a. Administrasi

Berupa transfer belum masuk, giro inkaso, tidak tahu atau lupa tanggal jatuh tempo.

b. *Cash flow*.

Berupa tanggal jatuh tempo pembayaran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan income atau gaji, tagihan macet temporer, terkena musibah atau bencana.

c. *Karakter*.

Berupa customer raib atau melarikan diri, customer memindah tangankan motor atau merentalkan motor, customer memindahkan nama atas nama orang lain.

Perjanjian pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tidak diatur dalam KUH Perdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa "*Semua perjanjian yang dibuat*

⁷ Hendi Rohendi, A/R Head PT. FIF Cabang Kota Surakarta, Wawancara Pribadi, 12 Mei 2010

⁸ *Ibid*

secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sebenarnya yang dimaksud dalam pasal ini adalah:

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Ada keleluasaan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH Perdata tersebut, yang juga sebagai hukum pelengkap ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak tersebut memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat di dalam KUH Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh Undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan Undang-undang.

Menurut Pasal 1319 KUH Perdata bahwa semua persetujuan baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak terkenal nama tentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lalu.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUH Perdata sehingga apabila

terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.

Mekanisme transaksi pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, hampir sama dengan mekanisme transaksi sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi untuk perorangan. Mekanisme transaksi pembiayaan konsumen sebagai berikut;

- a. Tahap permohonan
- b. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan
- c. Tahap pembuatan customer profile
- d. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite
- e. Tahap pengikatan
- f. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen
- g. Tahap pembayaran kepada supplier
- h. Tahap penagihan atau monitoring pembayaran
- i. Pengambilan Surat Jaminan

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Jadi jaminan dalam pembiayaan konsumen dibagi menjadi 3 yaitu;

- a. Jaminan utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat

dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi disini prinsip-prinsip kredit berlaku.

b. Jaminan pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang berangkat menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (pemberi dana) hingga kredit lunas.

c. Jaminan tambahan

Jaminan tambahan dalam transaksi pembiayaan ini berupa pengakuan hutang (*promissory notes*), atau *acknowledgment of indebtedness*, kuasa menjual barang dan *assignment of proceed* (*cessie*) dari asuransi. Di samping itu, sering juga dimintakan persetujuan isteri atau suami untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris atau rapat umum pemegang saham untuk konsumen perusahaan, sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dalam pembiayaan di PT FIF Cabang Kota Surakarta, juga terdapat permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua. Upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua pada PT FIF

Cabang Kota Surakarta dikenal dengan istilah” *COLLECTION MANAGEMENT* atau *ACCOUNT RECEIVABLE(A/R) MANAGEMENT*”.

Yang dimaksud dengan “*collection management* atau *A/R management*” adalah suatu proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer.⁹

Perlu diketahui bahwa collection tidak sama dengan penagihan, karena proses collectionnya dapat terjadi apabila nasabah dalam hal ini menunggak pembayarannya. Pada dasarnya setiap customer berkewajiban untuk membayar angsuran atau cicilan kreditnya sehingga bukan merupakan dari *A/R officer* untuk menagih apabila tidak atau belum terjadi penunggakan.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Antara Pembeli Dengan PT. Federal Internatioanl Finance (FIF) cabang Surakarta”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perjanjian dan pembiayaan sepeda motor pada PT FIF Kota Surakarta?

⁹ Hendi Rohendi, A/R Head PT. FIF Cabang Kota Surakarta, Wawancara Pribadi, 12 Mei 2010

2. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT FIF Kota Surakarta?
3. Apakah permasalahan dan hambatan yang muncul dalam perjanjian pembiayaan dan bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk mendiskripsikan Bentuk Perjanjian Pembiayaan sepeda motor pada PT FIF Kota Surakarta
 - b) Untuk mendiskripsikan prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT FIF Kota Surakarta.
 - c) Untuk mendiskripsikan permasalahan dan hambatan yang muncul dalam perjanjian pembiayaan dan penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi.
2. Tujuan Subjektif
 - a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang Hukum Perjanjian yang termasuk ke dalam Hukum Perdata khususnya

mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor antara pembeli dengan PT. Federal Internatioanl Finance (FIF) cabang surakarta.

- b) Untuk memperoleh data yang penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan hukum Perjanjian pada khususnya, terutama mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor antara pembeli dengan PT. Federal Internatioanl Finance (FIF) cabang Surakarta
- b) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perjanjian dan umumnya Hukum Perdata.
- c) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan terutama masyarakat yang belum

mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor antara pembeli dengan PT. Federal Internatioanl Finance (FIF).

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
- b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Dikatakan yuridis sosiologis karena mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial.¹⁰ Penelitian ini meneliti tentang kesesuaian putusan perundang-undangan yang berlaku tersebut dalam kehidupan sosial di masyarakat secara empirik. Orientasi

¹⁰ Bambang Sunggono, 1998, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta: Rajawali Press, Hal. 71

pengkajiannya menitikberatkan pada aspek perlakuan norma-norma yakni perjanjian.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penulisan ini, menggunakan bentuk penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu peristiwa yang lebih luas dan umum. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan dan menjelaskan yang selengkap-lengkapny tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor antara pembeli dengan PT. Federal Internatioanl Finance (FIF).

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi Di FIF Cabang Kota Surakarta, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian dekat dan memungkinkan untuk mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

4. Jenis data dan Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

b. Sumber Data sekunder

Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga instrumen ini: observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara mengadakan wawancara dengan Personalia ataupun yang berwenang dan berhubungan dengan perjanjian pembiayaan di FIF Cabang Kota Surakarta.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah di atas. Cara ini dimaksud untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

¹¹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 47.

6. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian, disusun dan ditulis dalam bentuk deskripsi dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan obyektif, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain yang diteliti agar dapat menggambarkan fenomena yang ada secara lebih konkret dan terperinci.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika penyusunan skripsi ini tertuang dalam empat (4) bagian yang tersusun dalam bab-bab, yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai skripsi ini nantinya, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
 2. Macam-macam perjanjian
 3. Subjek dan Objek Perjanjian
 4. Syarat Syahnya Perjanjian
 5. Azas-azas dalam Hukum Perjanjian
 6. Berakhirnya Suatu Perjanjian
- B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Sewa Beli
1. Pengertian Perjanjian Sewa Beli
 2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Beli
 3. Bentuk dan Isi Perjanjian Sewa Beli
 4. Resiko Dalam Sewa Beli
 5. Berakhirnya Perjanjian Sewa Beli
- C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan
 2. Kriteria Pengelompokan Transaksi Pembiayaan
 3. Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan
 4. Para Pihak Dan Kedudukannya Dalam Perjanjian Pembiayaan
 5. Dokumentasi Pembiayaan
 6. Mekanisme Transaksi Pembiayaan
 7. Jaminan-Jaminan Dalam Pembiayaan
 8. Wanprestasi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

1. Bentuk Perjanjian dan Pembiayaan sepeda motor pada PT FIF Kota Surakarta.
2. Prosedur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan sepeda motor pada PT FIF Kota Surakarta.
3. Permasalahan dan penyelesaiannya apabila terjadi perselisihan antara pihak kreditur (perusahaan pembiayaan) dan pihak debitur (konsumen) yang timbul karena wanprestasi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA